

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN
BELANJA MODAL**

(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

OLEH:

MAYANG SARI NASUTION
NIM 51143033



**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018 M/1439 H

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN
BELANJA MODAL**

(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)

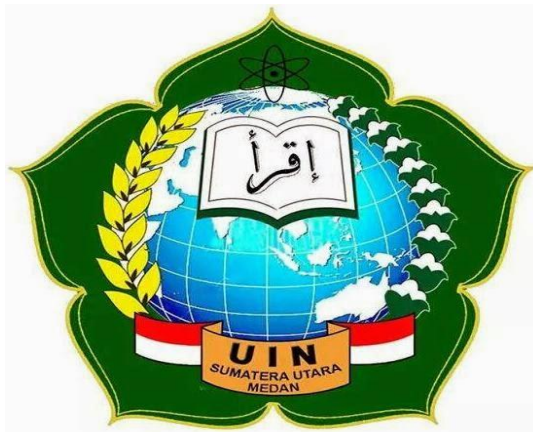
Oleh:

Mayang Sari Nasution

NIM 51143033

Jurusan:

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN
BELANJA MODAL**

(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

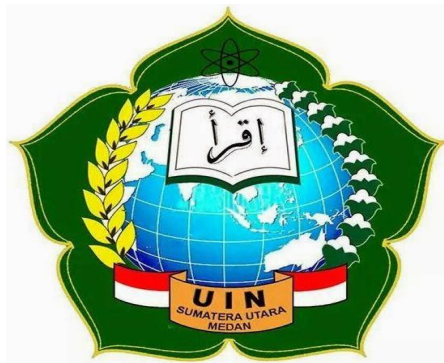
Oleh:

Mayang Sari Nasution

NIM 51143033

Jurusan:

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mayang Sari Nasution**
Nim : 51143033
Tempat/tgl. Lahir : Petumbukan, 13 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pertemuan No. 145 Petumbukan, Galang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Mayang Sari Nasution
NIM 51143033

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)”** an. Mayang Sari Nasution, NIM 51143033 Jurusan Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 06 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 06 Juli 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Drs. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

Sekretaris,



Fauzi Arif Dabis, MA
NIP. 19841224 201503 1 004

Anggota



1. Drs. M. Syahman Sitompul, SE, Ak, M.Si
NIP. 19530710 197712 1 001



2. M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIB. 1100000090



3. Kusmilawati, SE, Ak, M. Ak
NIP. 19800614 201503 2 001



4. Nurtaila, SE, MA
NIP. 19750521 200112 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN
BELANJA MODAL
(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh:

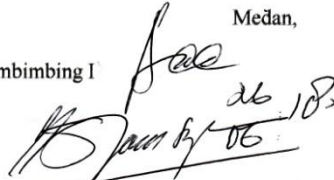
Mayang Sari Nasution

Nim. 51143033


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Juni 2018

Pembimbing I

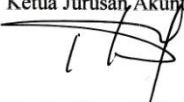

Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak, M.Si
NIP. 195307101977121001

Pembimbing II


Mhd. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIB. 1100000090

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi


Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

ABSTRAK

Mayang Sari Nasution (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang). Dengan Pembimbing Skripsi I Drs.Mhd.Syahman Sitompul, SE. Ak, M.Si dan Pembimbing II Mhd. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik (uji T) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,742 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,131 Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hal ini menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja Modal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang)”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda M. Syahnan Nasution dan Ibunda tercinta Fauziah Husna Daulay. Penulis mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa pula kepada Abang dan kakak yang selalu membantu penulis.
2. Bapak Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE.Ak, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Mhd. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku ketua jurusan akuntansi syariah dan sebagai penasehat akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.

6. Ibu Kamilah, SE. Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang banyak memberikan pelayanan dan membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan, dan layanan yang diberikan.
8. Bapak Masril, S.Sos, M.Si dan Ibu Syafitriani Lubis, M.M selaku Penasehat selama penelitian di BPKA Lubuk Pakam, yang membantu penulis dan memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini.
9. Elvira Ika Yandini, Fatimah Azmi, Nurul Ramadhani, Saidatul Abrosiah, Sofi Arika , dan Lili Sapitri sahabat sampai surga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Maimunah Napitupulu, S.E, yang selalu membantu dan memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi syariah B angkatan 2014.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga isi Skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, Juni 2018

Penulis

Mayang Sari Nasution

NIM . 51143033

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Anggaran Sektor Publik	8
B. Anggaran Pemerintahan : APBN dan APBD	21
C. Pendapatan Daerah	32
D. Belanja Daerah	40
E. Penelitian Sebelumnya	45
F. Kerangka Teoritis	47
G. Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan, Lokasi, dan Waktu Penelitian	50
B. Populasi dan Sampel.....	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Definisi Operasional	52
F. Teknik Analisa Data	53

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi	58
B. Ringkasan Laporan Keuangan.....	64
C. Deskripsi Data Penelitian	65
D. Pengujian Asumsi Klasik	69
E. Uji Hipotesis	73
F. Interpretasi Hasil Penelitian	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD.....	3
Tabel 1.2 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	45
Tabel 3.1 Variabel Independen dan Variabel Dependen	53
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (Kuartal)	65
Tabel 4.2 Belanja Modal (Kuartal)	66
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif PAD dan Belanja Modal	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Instansi	63
Gambar 4.2 Grafik PAD dan Belanja Modal	68
Gambar 4.3 Hasil Uji <i>Probability Plot</i>	71
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Era otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan secara aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada di daerah yang merupakan tantangan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan pembangunan. Umumnya di negara-negara maju yang merupakan kebijakan *Desentralisasi* atau otonomi daerah cenderung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang lukratif.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa

sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan pendapatan asli daerah nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pusat. Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan daerah merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah tersebut akan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda. Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perdagangan, pertanian, industri, transportasi dan lainnya) serta berpengaruh pula terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat. Jenis kegiatan dan proyek yang akan dibangun harus mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
PAD	2013	456.000.000.000,00	328.348.147.362,35	70,61
	2014	566.137.619.000,00	433.885.507.125,82	76,54
	2015	638.538.138.500,00	515.293.681.488,42	80,70
	2016	649.175.754.000,00	573.010.351.004,96	88,27
	2017	912.593.775.000,00	849.584.071.151,13	93,10

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang

Dari Tabel diatas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut dapat meningkatkan anggaran belanja daerah kabupaten Deli Serdang. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Dengan meningkatnya pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatnya daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Deli Serdang seharusnya mengubah komposisi belanja, dimana selama ini belanja daerah yang digunakan untuk belanja operasi yang kurang produktif daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari data rata-rata Realisasi APBD kabupaten Deli Serdang pada tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal	% BO	% BM
2013	2.034.622.4 88.868,59	1.652.297.62 8.088,59	352.334.308 .750,00	81,20	17,31
2014	2.392.252.7 35.840,18	1.807.241.57 5.116,30	553.705.889 .982,91	75,54	23,14
2015	2.465.451.7 09.658,55	1.972.405.05 7.480,73	491.710.226 .082,82	80,00	19,94
2016	3.005.435.3 86.844,06	2.443.150.92 9.029,43	561.285.600 .326,63	81,29	18,67
2017	3.377.765.4 82.083,88	2.635.932.29 9.378,71	741.456.897 .032,63	78,03	21,95

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap belanja daerah sangat rendah dibandingkan persentase belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang. Belanja operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat,

alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran dibiayai dana alokasi dari pusat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, penulis membatasi masalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat yang diharapkan adalah:

- a. Bagi Peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang pendapatan daerah dan belanja modal dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada. dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Bagi Pemerintah Daerah. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

- c. Bagi Pembaca dan Akademik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pendapatan daerah dan belanja modal di pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan instrumen ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya *output* dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹

Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

¹Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 88.

Akuntansi manajemen sektor publik yang berperan sebagai pemberi fasilitas terciptanya anggaran.²

Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.³

Secara singkat anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:⁴

- a. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
- b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut.

2. Anggaran dalam Perspektif Islam

Terdapat ayat Alquran yang berkaitan dengan anggaran yaitu dalam surah an-Nahl (16) : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Kaitannya dengan anggaran yaitu, dalam menyusun anggaran hendaklah dilakukan secara adil, tidak memihak kepada siapapun.

²V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 28.

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*, h. 29

Serta bertujuan untuk kepentingan bersama. Bukan menciptakan maupun menganiaya orang lain. Al Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebajikan dan menjauhi keburukan didalam Alquran.⁵

Q.S Al-Furqaan (25) : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Q.S al-Hasyr (59) : 7

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..”

Dari ayat diatas (Q.S Al-Hasyr : 7) Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.⁶

⁵<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn> diakses pada 18 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB.

⁶Nurul Huda, et.al., *Publik Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 65.

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, amar makruf nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya. Yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian, ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.⁷

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik sebagaimana hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan *treatment* terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.⁸

3. Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai :⁹

a. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan hak pengendali manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran sektor publik digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang akan diperoleh organisasi sektor publik. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.

⁷*Ibid.*, h. 76.

⁸*Ibid.*,

⁹V. Wiratna Sujarweni, *loc. Cit.*, h. 29.

- 2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
 - 3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
 - 4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
- b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi sektor publik, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, organisasi sektor publik akan kesulitan mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

Anggaran sebagai alat pengendali manajerial, anggaran ini berfungsi untuk meyakinkan organisasi sektor publik bahwa organisasi mempunyai sumber dana untuk membiayai rencana program-program organisasi. Anggaran sebagai pengendali manajemen organisasi untuk tidak melakukan pemborosan dan bekerja secara efisien tanpa ada korupsi.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara:

- 1) Membandingkan kinerja anggaran dengan realisasi.
- 2) Menghitung selisih anggaran.
- 3) Menemukan pos-pos biayai yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.
- 4) Merevisi anggaran biaya dan pendapatan untuk tahun berikutnya.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat Politik

Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Manajer publik dapat dikatakan gagal dan juga kredibilitas pemerintahan menurun apabila gagal melaksanakan anggaran yang telah disetujui.

e. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajemen organisasi publik. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya

sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

h. Alat Menciptakan Ruang Publik

Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Dimana keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti kabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedang kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapatan dan aspirasi melalui proses politik yang ada.

4. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁰

a. Anggaran Operasional

Anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor publik. Belanja operasi merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode.

b. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan akiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

¹⁰V. Wiratna Sujarweni, *Op.cit.*, h. 32.

5. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan:¹¹

- a. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.
- b. Untuk membantu dalam menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik.

Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

- a. Tujuan dan target yang akan diraih
- b. Pemilikan sumber daya
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target.
- d. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam, dan lain sebagainya.

6. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Anggaran

Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap:¹²

- a. Tahap Persiapan Anggaran

Tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*, h. 33.

anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi, karenanya manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya mata anggaran tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.

Di Indonesia arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasionalisasi GBHN, PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan PROPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi kemudian mulai dibuat persiapan APBN dan RAPETA.

Sementara itu ditingkat daerah (provinsi dan kab/kota) berdasarkan PP No. 108 pemerintah daerah diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPERNAS dan RENSTRA yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam PROPERDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas pembangunan yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. PROPERDA (RENSTRADA) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD

dalam kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.

Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat dan analisis kebijakan fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pemerintah bersama-sama DPRD menetapkan arah kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan strategi dan prioritas APBD. REPETADA memuat program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur dalam jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan:

- 1) Perimbangan-perimbangan yang berasal dari evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya.
- 2) Masukan dan aspirasi masyarakat.
- 3) Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) dan anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan demikian REPETADA merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi APBD.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki *managerial skill* dan *political skill*, *salesmanship* dan *coalition holding* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

7. Pendekatan Anggaran Sektor Publik

Terdapat dua macam pendekatan yang dipakai dalam melakukan penyusunan anggaran yaitu:¹³

a. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

¹³*Ibid.*, h. 50.

- 1) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* yaitu dalam membuat anggaran saat ini adalah dengan melakukan penambahan dan pengurangan anggaran tahun sebelumnya tanpa mengkaji lebih dalam. Kelemahannya adalah karena tidak melakukan pengkajian mendalam dalam membuat anggaran, maka menyebabkan kesalahan uang berkelanjutan dan juga tidak menjamin tidak terpenuhinya kebutuhan yang riil.
- 2) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item yaitu bahwa anggaran yang dibuat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran dan tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, meskipun ada penerimaan dan pengeluaran yang sudah tidak relevan untuk periode sekarang. Sehingga kinerja penilaian hanya bertolak ukur pada ketaatan menggunakan dana yang diusulkan saja.
- 3) Cenderung sentralistis

Bahwa penyiapan anggaran dilakukan secara terpusat dan informasinya tidak memadai, maka penilaian kinerja tidak maksimal dan akan mengakibatkan kesenjangan anggaran.
- 4) Bersifat spesifikasi

Pembuatan anggaran yang fokus, maka dibuatlah terpisah antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal
- 5) Tahunan

Untuk proyek investasi, pembuatan anggaran tahunan terlalu pendek, sehingga mengakibatkan muncul praktek-praktek yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi.
- 6) Menggunakan prinsip anggaran bruto. Membuat anggaran yang dibuat kurang sistematis, karena jumlahnya masih kotor dan seharusnya jumlah bersih.

b. Anggaran *New Public Management* (NPM)

Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ciri-ciri pendekatan ini adalah:

- 1) Komprehensif/komparatif
- 2) Terintegrasi dan lintas departemen
- 3) Proses pengambilan keputusan yang rasional
- 4) Berjangka panjang
- 5) Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
- 6) Analisis *total cost & benefit* (termasuk *opportunity cost*)
- 7) Berorientasi *input, output & outcome*
- 8) Adanya pengawasan kinerja

Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pendekatan anggaran *New Public Management* (NPM) yaitu:

- 1) Sistem anggaran yang mencakup penyusunan program sekaligus dengan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik.
- 2) Sistem *Zero Based Budgeting* (ZBB)

Teknik penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan berpedoman pada anggaran yang sudah dibuat tahun lalu. Diasumsikan anggaran dimulai dari nilai 0.

- 3) Sistem *Planning, Programing, dan Budgeting* (PPBS)

Teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan menekankan pada pengalokasian sumber daya. Sistem anggaran PPBS ini mendasarkan program dengan cara mengelompokkan aktivitas. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Mengingat sumber daya pemerintah terbatas, sedangkan tuntutan masyarakat tidak terbatas. Sehingga pemerintah harus memilih alternatif

keputusan yang bermanfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi. teknik ini mampu memberikan gambaran untuk membuat pilihan-pilihan tersebut.

B. Anggaran Pemerintahan : APBN dan APBD

1. Rencana Pembangunan Daerah

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan di masa mendatang. Untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan yaitu:¹⁴

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengacu pada visi misi pembangunan jangka panjang, dokumen perencanaan ini dibuat untuk periode 20 tahun. RPJPN Nasional merupakan penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dokumen perencanaan ini dibuat untuk periode 5 tahun. RPJMN Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Penyusunannya berpedoman pada RPJPN Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan ini dibuat untuk periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJMN Nasional,

¹⁴*Ibid.*, h. 53.

memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Begitu juga untuk pemerintah daerah, dalam membuat dokumen perencanaan tidak berbeda dengan dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Nasional (SPPN), yakni sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan dibuat untuk periode 20 tahun, mengacu pada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan arah dalam pembangunan daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen perencanaan dibuat untuk periode 5 tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen perencanaan dibuat untuk periode 1 tahun. RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Penyusunan Anggaran Pemerintah

Definisi anggaran telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam pembuatan anggaran pemerintah ini mengacu pada rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), RENSTRA pada tingkat nasional memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. RENJA pada tingkat nasional disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah diatas harus dilakukan secara terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia global, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran pemerintah itu dibagi menjadi 2 yaitu, Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).¹⁵

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember) yang ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan.¹⁶

Ruang lingkup APBN telah mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di Bank Sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN merupakan penerimaan dan pengeluaran “on budget”.¹⁷

a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Struktur anggaran pendapatan dan belanja terdiri dari:¹⁸

- 1) Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak
- 2) Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja daerah

¹⁵*Ibid.*, h. 55.

¹⁶*Ibid.*, h. 56.

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*, h. 57.

Belanja pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk penanggulangan bencana) dan belanja lainnya.

Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus.

3) Pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. Pembiayaan luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

b. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir maret, setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Dalam

keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.¹⁹

c. Pertanggungjawaban APBN

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD, baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial accountability*) maupun laporan kinerja (*performance accountability*). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan laporan kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang laporan kinerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini selambat-lambatnya disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Neraca
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagaimana di atas disampaikan ke DPR/DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti: Badan Layanan Umum (BLU).²⁰

¹⁹*Ibid.*, h. 58.

²⁰*Ibid.*, h. 59.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember.²¹

a. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan yang dimaksud dengan kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.²²

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, serta Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan,

²¹*Ibid.*, h. 60.

²²Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 44.

belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

3) Pembiayaan

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

APBD yang disusun dengan pendekatan Kinerja memuat :²³

- 1) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- 2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah.

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya. Yang dimaksud standar analisis belanja adalah penilaian kewajaran atau beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan tolak ukur kinerja adalah ukuran

²³*Ibid.*, h. 45.

keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. Sedangkan unit biaya yang berlaku masing-masing daerah.

b. Proses Penyusunan Anggaran

Proses itu menunjukkan bahwa anggaran belanja yang dirumuskan adalah penting karena proses tersebut dapat memberikan batasan pada hasil yang akan dicapai dan juga proses itu memprediksi kesulitan-kesulitan ekonomis tertentu terhadap anggaran belanja daerah.²⁴

Adapun tahapan-tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digambarkan sebagai berikut:²⁵

1) Tahap kesatu

Biro/bagian keuangan sudah mempunyai perkiraan mengenai penerimaan dalam tahun anggaran yang akan datang sehingga dapat dikeluarkan surat edaran oleh Kepala Daerah.

- a) Memintakan pengajuan usul Anggaran Belanja Rutin dari Dinas/Lembaga Daerah dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA).
- b) Meminta kepada Dinas/Lembaga daerah supaya mengajukan usul Anggaran Pembangunan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA).

2) Tahap kedua

- a) Pengajuan DUKDA oleh Dinas/Lembaga Daerah, diteliti dan dibahas oleh Biro/Bagian Keuangan bersama-sama Dinas/Lembaga Daerah yang bersangkutan.

²⁴*Ibid.*, h. 65.

²⁵*Ibid.*, h. 66.

- b) Pengajuan DUPDA oleh Dinas/Lembaga Daerah dan pembahasan antara BAPPEDA Provinsi/Kabupaten Biro/Bagian Keuangan, Biro/Bagian Pembangunan bersama dengan Dinas/Lembaga Daerah mengenai rencana yang tertera dalam DUPDA berdasarkan skala prioritas dalam Repelita Daerah.
- 3) Tahap ketiga
- Pengelolaan pada Biro/bagian keuangan, biro/bagian pembangunan dan Bappeda Provinsi/Kabupaten mengenai usul tersebut, serta penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah.
- 4) Tahap keempat
- a) DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah.
 - b) Persetujuan dari Kepala Daerah.
 - c) Penuangan anggaran dalam bentuk Pra Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk disampaikan kepada Dewan.
 - d) Apabila dianggap perlu PraRAPBD tersebut dapat disampaikan kepada DPRD d.h.i Panitia Anggaran.
- 5) Tahap kelima
- a) Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya (Rancangan APBD) kepada DPRD.
 - b) Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c) Persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d) Penetapan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah.
- 6) Tahap keenam
- a) Pengiriman Peraturan Daerah tentang penetapan APBD kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan.

- b) Persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran mendatang.

c. Fungsi Anggaran

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk:²⁶

- 1) Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia.
- 2) Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah.
- 3) Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu:²⁷

- 1) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- 2) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
- 3) Anggaran menjadi sasaran sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

d. Tujuan Anggaran

Tujuan pengelolaan anggaran meliputi :²⁸

- 1) Kesejahteraan masyarakat

²⁶*Ibid.*, h. 41.

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*, h. 33.

Dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

2) Membuka kesempatan kerja

Anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran belanja kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Mengurangi pengangguran

Efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagi bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.

4) Pelayanan masyarakat

Indikator keberhasilan sebuah pemerintah adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

C. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara / daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan (*revenue*) berbeda dengan penghasilan (*income*). Penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan.²⁹

2. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan.

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis *cash toward accrual*, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi :

a. Pendapatan Pemerintah Pusat:

- 1) Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak internasional antara lain bea masuk dan pajak / pungutan ekspor.
- 2) Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan,. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya.
- 3) Pendapatan hibah.

²⁹ Deddi Nordiawan, *et. al.*, *Akuntansi Pemerintahan*,(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 179-180.

b. Pendapatan Pemda:

- 1) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk jenis pendapatan ini adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.³⁰

3. Sistem Akuntansi Pendapatan

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah, di mana setiap pendapatan tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- a. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- c. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang,

³⁰*Ibid.*, h. 180-181.

baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

- d. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- e. Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- f. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- g. Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.³¹

4. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.³²

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di

³¹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 150.

³²Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.³⁴

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk mernberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁵

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan

³³Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

³⁴Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

³⁵Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51-52.

Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.³⁶

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.³⁷

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

a. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.³⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

³⁶Novi Pratiwi, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007)

³⁷*Ibid.*,

³⁸Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 77

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁹

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁴⁰

Jenis pajak daerah menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu antara lain:⁴¹

- 1) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan
 - e) Pajak rokok
- 2) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan

³⁹Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Akses pada www.djpk.depkeu.go.id tanggal 10 Februari 2018 pukul 12.00 WIB

⁴⁰Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.

⁴¹Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Akses pada www.djpk.depkeu.go.id tanggal 15 Februari 2018 pukul 10.00 WIB

- d) Pajak Reklame
- e) Pajak penerangan Jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴² Retribusi ini dirinci menjadi:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :⁴³

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan Lain-lain yang Sah

⁴²Ahmad Yani, *Op. Cit.* h. 63.

⁴³Indra Bastian., *Op. Cit.*, h. 148.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :⁴⁴

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan.

D. Belanja Daerah

1. Pengertian Belanja Daerah

Di dalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pengeluaran daerah. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa

⁴⁴*Ibid.*,

pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Kewajiban-kewajiban Pemerintah daerah tersebut dapat terpenuhi melalui pengeluaran/belanja daerah. Pengertian belanja daerah menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, dan jenis belanja.⁴⁵ Selanjutnya dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 bahwa :

- a. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :
 - 1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan
 - 2) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara
- c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari :
 - 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja barang dan jasa
 - 3) Belanja modal
 - 4) Bunga
 - 5) Subsidi
 - 6) Hibah

⁴⁵Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- 7) Bantuan sosial
- 8) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- 9) Belanja tidak terduga.

Sedangkan di dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok.

- a. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - 1) Belanja menurut urusan wajib mencakup : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkunganhidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.
 - 2) Belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian, kehutanan. Energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan. perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
- b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
- c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - 1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- 2) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.⁴⁶

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya. Penjelasan kategori belanja modal tersebut adalah:⁴⁷

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan

⁴⁶Rudi Badrudin., *Op.Cit.*, h. 61.

⁴⁷*Ibid.*, h. 69.

perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal, jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ penggantian / peningkatan/pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

E. Penelitian Sebelumnya

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

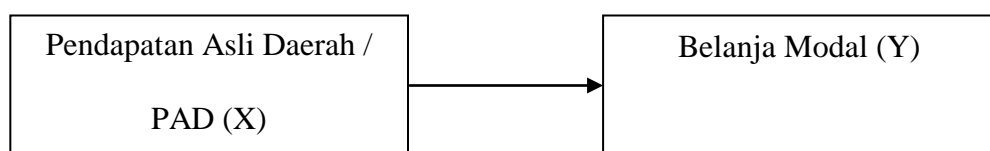
No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Bambang Suprayitno (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah di Provinsi di Pulau Jawa	Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif. PAD berpengaruh signifikan dan positif. DAU berpengaruh signifikan dan positif.
	Darwanto dan Yustikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan	Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan

			Asli Daerah, Dana Alokasi Umum	PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan.
	Ivana (2009)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi	DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal
	Fitria Megawati Sularno (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen: Pertumb uhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum	Variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
	Arwati dan Hadiati (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan	Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen tersebut berpengaruh signifikan

		Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum	terhadap belanja modal
	Nirna dan Edynus (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal

F. Kerangka Teoritis

Berikut ini kerangka teoritis yang dapat dibuat berdasarkan teori diatas :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

1. PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Didalam PAD terdapat beberapa indikator PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan variabel Independen (X).
2. Belanja modal merupakan belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini belanja modal merupakan variabel dependen (Y).

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁴⁸

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96

Menurut Mardiasmo dalam fitria, peningkatan investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.⁴⁹

Menurut Rochjadi dalam Rudy, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pemberian layanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap layanan publik dapat berbeda-beda antar daerah, tetapi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan layanan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan layanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.⁵⁰

Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal

Ha: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja
Modal

⁴⁹Fitria Megawati Sularno, "Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", (Strata Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, 2013), h. 35

⁵⁰Rudy Badrudin, *Op.Cit.*, h. 66

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.⁵²

Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁵³

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang berlokasi di jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam Deli Serdang. Jadwal penelitian direncanakan mulai awal April sampai dengan Mei 2018.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis,

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 11.

⁵²Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 33.

⁵³Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.⁵⁴ Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sampling*.⁵⁵ Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.

2. Sumber Data

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain.⁵⁶ Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 173.

⁵⁵*Ibid.*, h. 183.

⁵⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain seperti buku-buku dan sebagainya.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017.

E. Definisi Operasional

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constuct* yang lebih baik.⁵⁸

1. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁵⁹ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nommor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

⁵⁷*Ibid.*, h. 201.

⁵⁸Husein Umar, *Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke 2), h. 233.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 59

⁶⁰Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di akses pada www.djpk.depkeu.go.id tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.54 WIB.

karena adanya variabel bebas.⁶¹ Variabel bebas pada penelitian ini adalah belanja modal (X). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa dianggarkan pada belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.⁶²

Tabel 3.1
Variabel Independen dan Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen Penelitian
Pendapatan Asli Daerah (X) (Independen)	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Belanja Modal (Y) (Dependen)	Jumlah Realisasi Belanja Modal	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

F. Teknik Analisa Data

Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

⁶¹Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 59

⁶²Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 61.

1. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogrov Smirnov*.⁶³

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatter plot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika :⁶⁴

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

⁶³V. Wiranta Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52.

⁶⁴*Ibid.*, h. 186-187.

Jika hasil output Scatter plot demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat hubungan, baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel – variabel penelitian. Deteksi gejala autokorelasi digunakan nilai *Durbin Watson* (DW) dengan membandingkan antara uji *Durbin Watson* dengan nilai tabel.

Penarikan kesimpulan ada atau tidaknya gejala autokorelasi berdasarkan :

1. Lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi positif
2. Apabila DW hitung lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
3. Apabila DW hitung terletak antara batas atas (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti bebas dari autokorelasi
4. Apabila DW hitung lebih rendah dari batas bawah (dl) atau terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y.

b. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi.⁶⁵

Adapun persamaan dalam regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Anggaran Belanja Modal, sebagai Dependen

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan variabel Y

X = PAD sebagai Independen

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dalam menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci sehingga analisis akan mudah dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan.

c. Uji Signifikan Parametik Individual (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/dependen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi secara 0,05 ($\alpha = 5\%$). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:⁶⁶

a) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

⁶⁵Duwi Priyatno, *SPSS HANDBOOK*, (Yogyakarta: MediaKom, 2016), h. 92.

⁶⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit-UNDIP), h. 98.

- b) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai T_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 atau terletak diantara nilai tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, bila nilai T_{hitung} lebih kecil atau sama dengan (\leq) dari nilai tabel, maka H_0 diterima. Nilai T_{hitung} adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat positif atau negatif nilainya.⁶⁷

⁶⁷Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabet, 2007), h. 95.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Instansi

Kabupaten deli serdang yang dikenal sekarang ini sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan daerah pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (Kesultanan) Deli yang berpusat di kota Medan dan kesultanan Serdang yang berpusat di Perbaungan.

Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan secara spontan menuntut agar Negara Sumatera Timur yang dianggap prakarsa *Van Mook* (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk ke Negara Republik Indonesia (NRI) Sumatera Timur yang dibetuk Font Nasional. Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia.

Akhirnya pemerintah NRI meminta kepada RIS untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan negara kesatuan dengan hasil antara lain undang-undang dasar sementara yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan UUD 1945. Atas dasar tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas afdeling, salah satu diantaranya adalah Deli Serdang. Afdeling ini dipimpin oleh asisten residen beribu kota Medan serta terbagi atas empat onder afdeling yaitu Beneden Deli beribukota Medan, Bovan Deli beribukota di Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Padang Bedagei

beribukota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh seorang kontelir.

Selanjutnya, dengan keputusan DPR Sumatera Timur dibagi menjadi 6 kabupaten yang terdiri atas 6 kedewanan yaitu , Deli Hulu, Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagai, Padang/Kota Tebing Tinggi, pada waktu itu berkedudukan di perbaungan. Pada tanggal 14 November 1956, Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi daerah otonomi dan namanya berubah menjadi Daerah Kabupaten Deli Serdang Sesuai dengan UU No.2 Tahun 1948 yaitu UU Pokok-pokok Pemerintah Daerah dengan UU No.7 Tahun 1956. Untuk merealisasinya, dibentuklah DPR dan DPD. Namun, tahun demi tahun seiring perjalanan sejarah, dan setelah melalui usaha penelitian dan seminar-seminar oleh pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bentuk tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1983.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 November tahun 2007 secara resmi Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Daerah Deli Serdang terbentuk dan dipimpin oleh seorang kepala dinas.⁶⁸

Namun, pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Daerah No.5 tahun 2007 yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁶⁸Republik Indonesia. 2007. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Deli Serdang. Diakses pada tanggal 22 februari 2018.

Kabupaten Deli Serdang pada bulan september tahun 2014 dan dipimpin oleh seorang kepala Badan.⁶⁹

2. Ruang Lingkup Instansi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibiang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁶⁹Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di akses pada tanggal 22 februari 2018 pukul 12.00 WIB

f. Pengelolaan unit pelaksana teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi proses, Substansi maupun pengawasannya bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang demikian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan berbagai tugas dalam pemcapaian rencana dalam program Rencana Pembangunan yang pada dasarnya dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.⁷⁰

3. Lokasi Instansi

Lokasi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berada di jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam yang berada di komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

4. Daerah Jangkauan Instansi

Daerah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang adalah daerah-daerah yang berada di kawasan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan, yaitu :

- 1) Bangun Purba
- 2) Batang Kuis
- 3) Beringin
- 4) Biru-Biru
- 5) Deli Tua
- 6) Galang
- 7) Gunung Meriah
- 8) Hampan Perak

⁷⁰Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 2014. Rencana Strategik 2014-2019. Hal. 10.

- 9) Kutalimbaru
- 10) Labuhan Deli
- 11) Lubuk Pakam
- 12) Namo Rambe
- 13) Pagar Merbau
- 14) Pancur Batu
- 15) Pantai Labu
- 16) Patumbak
- 17) Percut Sei Tuan
- 18) Sibolangit
- 19) Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)
- 20) Sinembah Tanjung Muda Hulu (STM Hulu)
- 21) Sunggal
- 22) Tanjung Morawa

5. Visi, Misi dan Motto serta Program

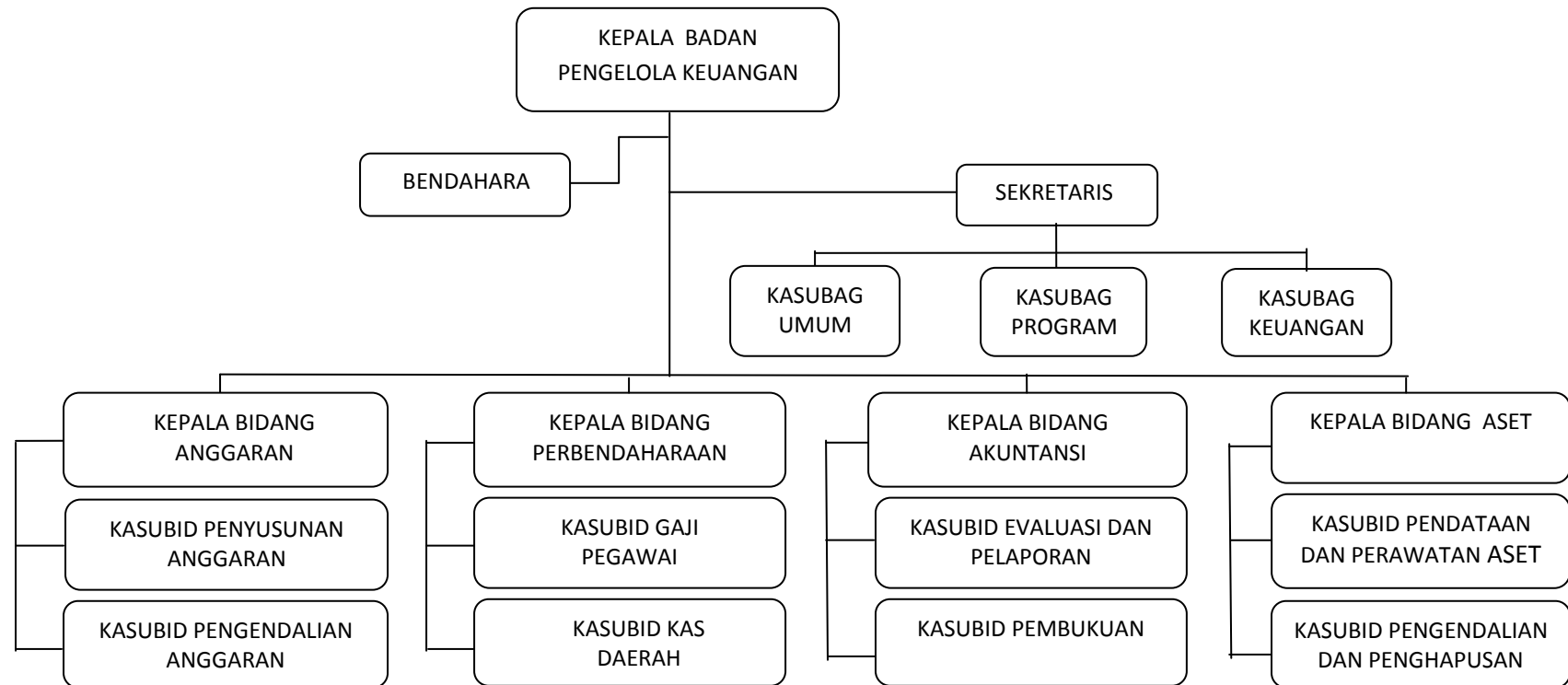
- **Visi**

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel

- **Misi**

- 1) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran yang Efektif dan Efisien
- 3) Meningkatkan Penatausahaan Kas Daerah yang Efektif dan Optimal dalam Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu Serta Pengendalian Belanja Daerah
- 4) Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
- 5) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

6. Struktur Organisasi Instansi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Instansi

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

B. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.096.336.073.545,35 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	: Rp	328.348.147.362,35
- Pendapatan Transfer	: Rp	1.756.113.110.433,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	: Rp	11.874.815.750

Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.034.622.488.868,59 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

2. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.450.204.561.759,82 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	: Rp	433.885.507.125,82
- Pendapatan Transfer	: Rp	2.007.514.826.334,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	: Rp	8.804.228.300,00

Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.392.252.735.840,18 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

3. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.782.141.454.678,42 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	: Rp	515.293.681.488,42
- Pendapatan Transfer	: Rp	2.251.862.365.570,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	: Rp	14.985.407.620,00

Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.465.451.709.658,55 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

4. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.112.343.380.366,96 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah : Rp 573.010.351.004,96
- Pendapatan Transfer : Rp 2.539.333.029.362,00

Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.005.435.386.844,06 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

5. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.332.337.760.502,13 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah : Rp 849.584.071.151,13
- Pendapatan Transfer : Rp 2.476.079.377.351,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp 6.674.312.000,00

Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.377.765.482.083,88 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga.

C. Deskripsi Data Penelitian

Setelah melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset, penulis telah mendapatkan data sekunder berupa laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah pada Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2017. Berikut ini Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 yang disajikan dalam kuartalan :

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017
(Kuartal)

Tahun	Kuartal	PAD
2013	4	328.35

2014	1	354.73
2014	2	381.12
2014	3	407.5
2014	4	433.89
2015	1	454.24
2015	2	474.59
2015	3	494.94
2015	4	515.29
2016	1	529.72
2016	2	544.15
2016	3	558.58
2016	4	573.01
2017	1	642.15
2017	2	711.3
2017	3	780.44
2017	4	849.58

Sumber : Data Sekunder yang diolah

2. Belanja Modal

Belanja Modal yang diteliti pada penelitian ini adalah Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang Periode 2013-2017. Data belanja modal disajikan dalam bentuk Kuartal seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Belanja Modal Tahun 2014-2017

(Bulanan)

Tahun	Kuartal	Belanja Modal
2013	4	352.33
2014	1	402.68
2014	2	453.02
2014	3	503.36
2014	4	553.71
2015	1	538.21
2015	2	522.71
2015	3	507.21
2015	4	491.71
2016	1	509.1
2016	2	526.5
2016	3	543.89
2016	4	561.29

2017	1	606.33
2017	2	651.37
2017	3	696.41
2017	4	741.46

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel PAD dan belanja modal. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif variabel PAD dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.3

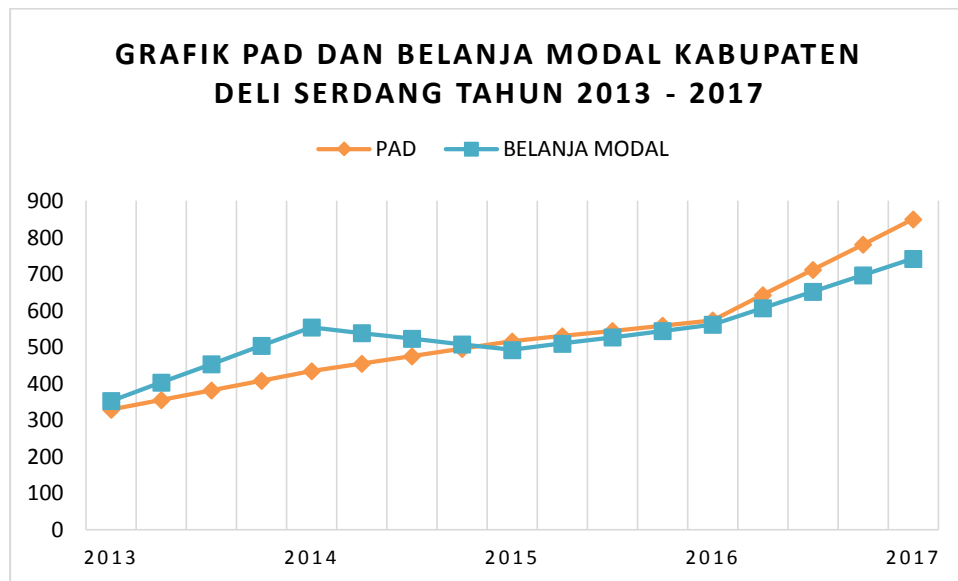
Hasil Analisis Deskriptif Variabel PAD dan Belanja Modal

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	17	328.35	849.58	531.3876	146.02726
Belanja_Modal	17	352.33	741.46	538.8991	96.92753
Valid N (listwise)	17				

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pendapatan asli daerah kabupaten Deli Serdang pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai pendapatan asli daerah kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu pengamatan memiliki nilai terendah sebesar 328,35 Milyar dan tertinggi sebesar 849,58 Milyar dengan rata-rata sebesar 531,388 Milyar dan standar deviasi sebesar 146,027.

Selanjutnya, pada variabel belanja modal, nilai terendah variabel belanja modal adalah sebesar 352,33 dan tertinggi sebesar 741,46 dengan rata-rata sebesar 538,899 Milyar dan standar deviasi sebesar 96,928.

Selanjutnya berdasarkan data hasil interpolasi data PAD dan belanja modal ke dalam bentuk kuartal, dapat dibuat grafik PAD dan belanja modal selama kurun waktu 2013 – 2017 sebagai berikut :



Gambar 4.2

Grafik PAD dan Belanja Modal

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu pengamatan, baik nilai PAD maupun belanja modal kabupaten Deli Serdang cenderung meningkat. Nilai PAD dan belanja modal tertinggi terjadi di tahun 2017 sedangkan nilai PAD dan belanja modal terendah terjadi tahun 2013.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat juga bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sejalan dengan peningkatan belanja modal yang mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara PAD dan belanja daerah. Untuk menguji signifikansi hubungan tersebut, maka perlu dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum

kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.⁷¹

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, alat uji ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen X dengan variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik regresi apakah menunjukkan hubungan yang linier atau tidak.⁷² Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

D. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sebelum dilakukan analisis regresi sederhana, data penelitian akan diuji dengan serangkaian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk menguji bahwa hasil regresi layak digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogrov-Smirnov*: Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal, jika

⁷¹Sutrisno Hadi, *Metode Researc*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42

⁷²Duwi Priyatno, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian SPSS*, (Yogyakarta: Graha Media, 2010), h. 54.

sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.⁷³ Adapun alat untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandar dized Residual
N			17
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		32.875139
Most Extreme Differences	Absolute		.169
	Positive		.169
	Negative		-.075
Kolmogorov-Smirnov Z			.697
Asymp. Sig. (2-tailed)			.716

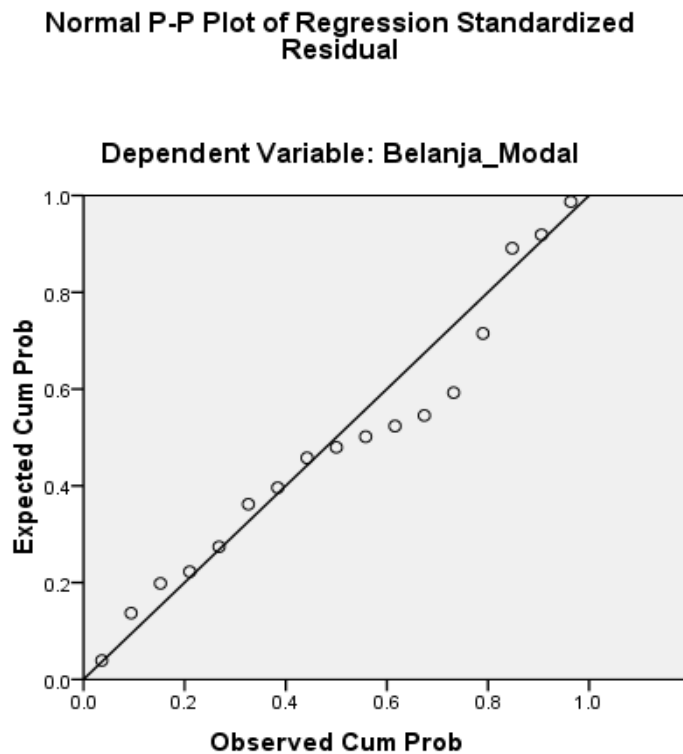
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel diatas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansi 0,716 nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,716>0,05) Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dinyatakan dapat mewakili populasi.

Sedangkan hasil uji dari *normal probability plot* memiliki hasil sebagai berikut:

⁷³ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52.



Gambar 4.3
Hasil Uji Probability Plot

Sumber : SPSS 20 diolah 2018

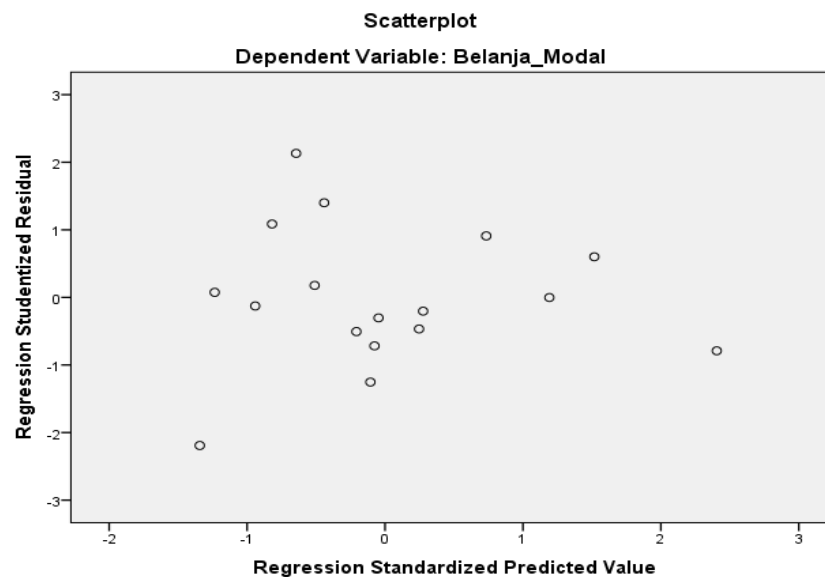
Dari gambar diatas terlihat bahwa sebaran data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data memnuhi syarat-syarat normalitas dan hasil ini sesuai dengan hasil uji *kolmogrov smirnov* yang dilakukan sebelumnya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas secara grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel independen ZPRED dengan nilai residunya SRESID. Model regresi dinyatakan tidak memuat heteroskedastisitas jika (1) Titik-titik data menyebar di atas dan di

bawah atau di sekitar angka 0, (2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, (3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan (4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Hasil output heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: SPSS 20 diolah 2018

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas secara grafik pada gambar 4.4, dapat dilihat bahwa (1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, (2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, (3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembalidan (4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (tahun sebelumnya). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW-test). Berikut hasil pengujian *Durbin Watson* :

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi (DW-test)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,943 ^a	,890	,882	37,21379	1,685

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,685. Nilai *Durbin-Watson* berdasarkan tabel dengan nilai statistik atau derajat kepercayaan sebesar 5% dengan jumlah $K=1$ dan $N=17$ adalah d_L sebesar d_U sebesar 1,133 dan d_U sebesar 1,381 sehingga nilai $4-d_U$ sebesar 2,618. Berdasarkan hasil dari *Durbin-Watson* pada penelitian ini menunjukkan nilai 1,685 yang berarti nilai uji *Durbin-Watson* berada diantara d_U dan $4-d_U$ ($d_U < d < 4-d_U$) atau $1,381 < 1,685 < 2,618$ maka dalam model persamaan regresi ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur masing-masing besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R^2 kecil menunjukkan kemampuan

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS:

Tabel 4.6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.877	33.95330

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Hasil analisis regresi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa besar koefisien determinasi pengaruh variabel PAD terhadap belanja modal adalah sebesar 0,885, hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi PAD terhadap belanja modal adalah sebesar 88,5% sedangkan sisanya sebesar 11,5% variansi belanja modal dipengaruhi oleh faktor lain di luar pendapatan asli daerah.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pada prinsipnya model regresi linier sederhana merupakan satu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	207.091	31.968		6.478	.000
PAD	.624	.058	.941	10.742	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Berdasarkan hasil analisis tersebut, nilai konstanta persamaan regresi yang terbentuk adalah sebesar 207,091 Milyar dengan koefisien regresi sebesar 0,624 sehingga persamaan regresi yang terbentuk antara variabel PAD dan belanja modal adalah sebagai berikut :

$$Y = 207,091 + 0,624 X$$

Dengan :

Y = Belanja Modal

X = Pendapatan Asli Daerah

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah bahwa kenaikan PAD sebesar 1 satuan (1%) dapat meningkatkan belanja modal hingga sebesar 62,4%. Atau jika PAD naik sebesar 1 Milyar, maka belanja modal akan meningkat sebesar Rp 624.000.000.

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.u diatas.

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t_{tabel} dengan signifikan 5% atau 0,05

berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df)= n-k atau 17-2=15. Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} adalah 2,131.

Dari hasil uji signifikansi parametrik individual (uji t) pada variabel pendapatan asli daerah menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 10.742 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($10.742 > 2,131$) serta nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut berarti bahwa H_a diterima dan ini berarti bahwa secara parsial variabel independen atau pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

F. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017 dilakukan pembahasan sebagai berikut:

Terdapat persamaan regresinya yaitu $Y = 207,091 + 0,624 X$. Model persamaan regresi tersebut bermakna:

- a. Nilai konstan sebesar 207,091 artinya apabila variabel pendapatan asli daerah bernilai nol maka anggaran belanja modal sebesar 207,091 satuan atau sebesar Rp 207.091.000.00
- b. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,624 artinya setiap pertambahan 1% variabel PAD akan menaikkan anggaran belanja modal sebesar 0,624 satuan.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi belanja modal, begitu sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suprayitno pada tahun 2015, Darwanto dan yustikasari pada tahun 2007, dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh

positif dan signifikan. Fitria Megawati Sularno serta Arwati dan Hadiati pada tahun 2013 dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Melihat hasil penelitian diatas telah menunjukkan pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Untuk itu, pendapatan asli daerah harus diupayakan agar selalu meningkat yang bertujuan untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui belanja modal.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah

tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat maka apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Kabupaten Deli Serdang yang optimal. Jika pendapatan asli daerah mencapai target dalam realisasi yang ditetapkan pemerintah kabupaten deli serdang tidak menutup kemungkinan bahwasanya kabupaten deli serdang akan menjadi daerah yang mandiri dalam melakukan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebesar 0,885, hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal adalah sebesar 88,5% sedangkan sisanya sebesar 11,55% variansi belanja modal dipengaruhi oleh faktor lain di luar pendapatan asli daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah kabupaten Deli Serdang. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan oleh daerah tersebut.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan meneliti dengan masalah yang serupa disarankan agar penelitian dilakukan pada objek yang lebih luas, tidak hanya pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan penggunaan data yang lengkap serta rentang waktu periode yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang juga harus lebih lengkap dan bervariasi.
2. Bagi pemerintah daerah kedepannya diharapkan lebih memperhatikan mengenai pembagian antara pengeluaran serta pendapatan yang dikelola pemerintah, dengan hal demikian mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Dan pemerintah daerah harus tetap mempertahankan serta meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber pendapatan asli daerah agar terus naik setiap tahunnya, sehingga dapat menambah komposisi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: ANDI. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Huda, Nurul, *et.al.*, *Publik Keuangan*. Jakarta: Kencana.2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA. 2010.
- Nordiawan, Deddi, *et. al.*, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Pratiwi, Novi. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 2007.
- Priyatno, Duwi. *SPSS HANDBOOK*. Yogyakarta: MediaKom. 2016.
- Priyatno, Duwi. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian SPSS*. Yogyakarta: Graha Media. 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G* . Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabet. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Sujarweni, V. Wiranta. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 2015.
- Sujarweni, V. Wiranta. *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Press. 2015.
- Sularno,Fitria Megawati. *Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Strata Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

www.djpk.depkeu.go.id

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn>

LAMPIRAN

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2013-2017**

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2013	456.000.000.000,00	328.348.147.362,35	70,61
	2014	566.137.619.000,00	433.885.507.125,82	76,54
	2015	638.538.138.500,00	515.293.681.488,42	80,70
	2016	649.175.754.000,00	573.010.351.004,96	88,27
	2017	912.593.775.000,00	849.584.071.151,13	93,10

Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2013-2017

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal	2013	402.766.879.293,00	352.334.308.750,00	87,47
	2014	649.760.068.683,00	553.705.889.982,91	85,22
	2015	668.814.619.240,00	491.710.226.082,82	73,52
	2016	692.809.977.017,00	561.285.600.326,63	81,02
	2017	838.781.185.799,16	741.456.897.032,63	88,40

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2013-2017

Hasil Interpolasi (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Kuartal	PAD	Belanja Modal
2013	4	328.35	352.33
2014	1	354.73	402.68
2014	2	381.12	453.02
2014	3	407.5	503.36
2014	4	433.89	553.71
2015	1	454.24	538.21
2015	2	474.59	522.71
2015	3	494.94	507.21
2015	4	515.29	491.71
2016	1	529.72	509.1
2016	2	544.15	526.5
2016	3	558.58	543.89
2016	4	573.01	561.29
2017	1	642.15	606.33
2017	2	711.3	651.37
2017	3	780.44	696.41
2017	4	849.58	741.46

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

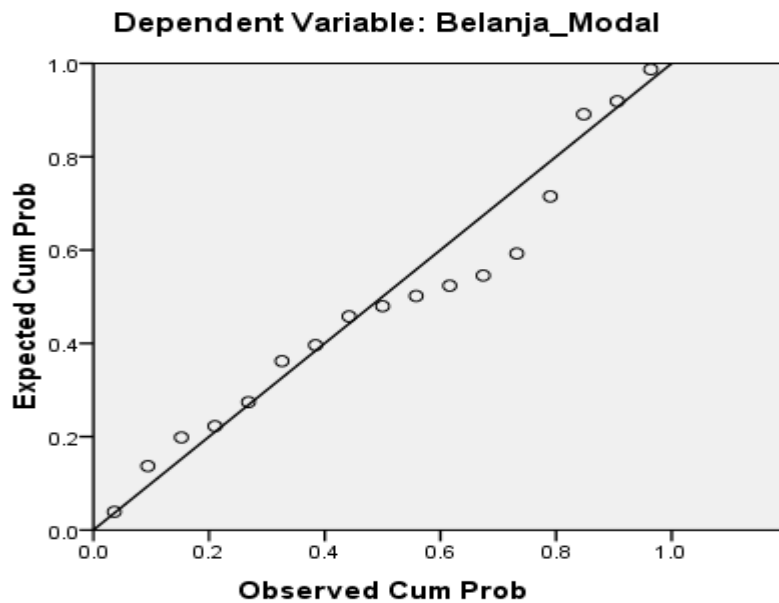
		Unstandardized Residual
N		17
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	32.87513971
Most Extreme Differences	Absolute	.169
	Positive	.169
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.697
Asymp. Sig. (2-tailed)		.716

a. Test distribution is Normal.

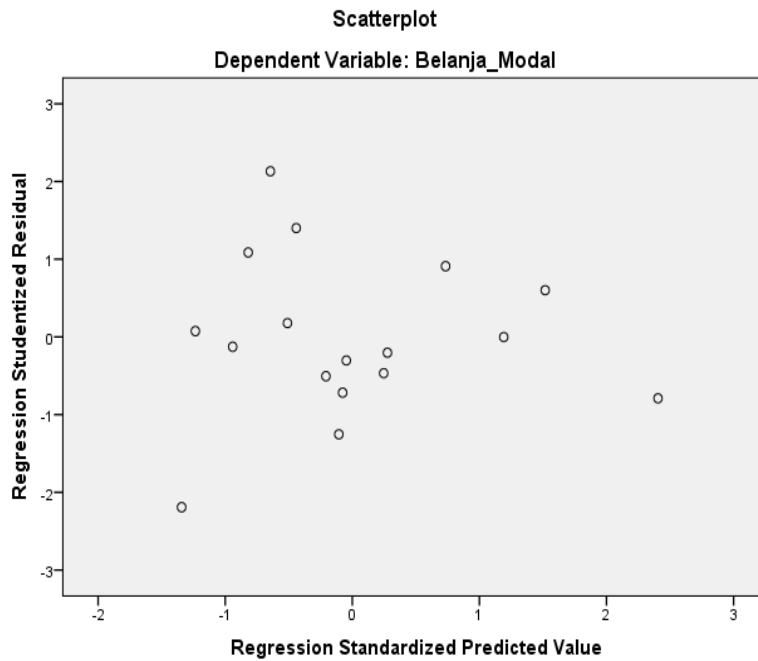
b. Calculated from data.

PROBABILITY PLOT

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



HETEROSKEDASTISITAS



AUTOKORELASI (DURBIN-WATSON)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,943 ^a	,890	,882	37,21379	1,685

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

HASIL UJI REGRESI

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.877	33.95330

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	133026.744	1	133026.744	115.392	.000 ^a
	Residual	17292.397	15	1152.826		
	Total	150319.141	16			

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	207.091	31.968		6.478	.000
	PAD	.624	.058	.941	10.742	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

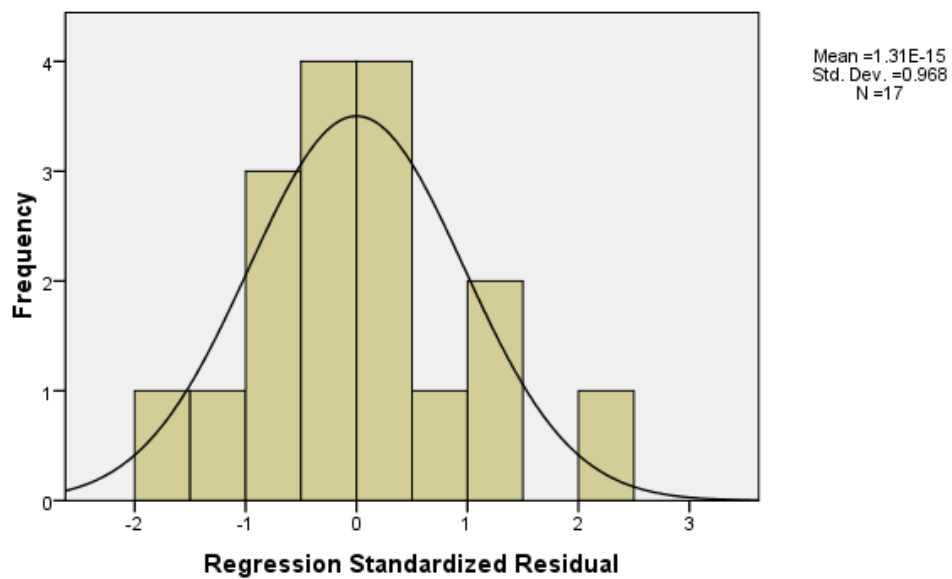
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	412.1175	737.5867	538.8991	91.18208	17
Std. Predicted Value	-1.390	2.179	.000	1.000	17
Standard Error of Predicted Value	8.235	20.247	11.157	3.441	17
Adjusted Predicted Value	425.2099	735.4512	539.1123	90.23168	17
Residual	-59.78350	75.68865	.00000	32.87514	17
Std. Residual	-1.761	2.229	.000	.968	17
Stud. Residual	-1.944	2.333	-.003	1.024	17
Deleted Residual	-72.87589	82.87264	-.21315	36.84087	17
Stud. Deleted Residual	-2.171	2.823	.019	1.131	17
Mahal. Distance	.000	4.748	.941	1.285	17
Cook's Distance	.000	.414	.060	.112	17
Centered Leverage Value	.000	.297	.059	.080	17

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Histogram

Dependent Variable: Belanja_Modal



DISTRIBUSI NILAI t_{tabel}

df	$t_{0.99}$	$t_{0.95}$	$t_{0.90}$	$t_{0.85}$	$t_{0.80}$	df	$t_{0.99}$	$t_{0.95}$	$t_{0.90}$	$t_{0.85}$	$t_{0.80}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.669
2	1.888	2.920	4.303	6.965	9.925	62	1.296	1.671	2.000	2.389	2.669
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	63	1.296	1.670	2.000	2.389	2.668
4	1.533	2.132	2.778	3.747	4.604	64	1.296	1.670	2.000	2.388	2.667
5	1.476	2.015	2.571	3.395	4.032	65	1.296	1.670	2.000	2.388	2.667
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	66	1.295	1.670	2.000	2.387	2.666
7	1.415	1.895	2.395	2.998	3.499	67	1.295	1.670	2.000	2.387	2.665
8	1.397	1.860	2.368	2.898	3.355	68	1.295	1.670	2.000	2.386	2.665
9	1.383	1.833	2.352	2.821	3.250	69	1.295	1.669	2.000	2.386	2.664
10	1.372	1.812	2.338	2.764	3.169	70	1.295	1.669	2.000	2.385	2.663
11	1.363	1.796	2.321	2.718	3.106	71	1.295	1.669	2.000	2.385	2.663
12	1.356	1.782	2.310	2.681	3.055	72	1.295	1.669	2.000	2.384	2.662
13	1.350	1.771	2.300	2.650	3.012	73	1.295	1.669	2.000	2.384	2.661
14	1.345	1.761	2.292	2.624	2.977	74	1.295	1.668	2.000	2.383	2.661
15	1.341	1.753	2.285	2.602	2.947	75	1.295	1.668	2.000	2.383	2.660
16	1.337	1.746	2.280	2.583	2.921	76	1.294	1.668	2.000	2.382	2.649
17	1.333	1.740	2.276	2.567	2.898	77	1.294	1.668	2.000	2.382	2.649
18	1.330	1.734	2.271	2.552	2.878	78	1.294	1.668	2.000	2.381	2.648
19	1.328	1.729	2.267	2.539	2.861	79	1.294	1.668	2.000	2.381	2.647
20	1.325	1.725	2.264	2.528	2.845	80	1.294	1.667	2.000	2.380	2.647
21	1.323	1.721	2.260	2.518	2.831	81	1.294	1.667	2.000	2.380	2.646
22	1.321	1.717	2.257	2.508	2.819	82	1.294	1.667	2.000	2.379	2.645
23	1.319	1.714	2.255	2.500	2.807	83	1.294	1.667	2.000	2.379	2.645
24	1.318	1.711	2.254	2.492	2.797	84	1.294	1.667	2.000	2.378	2.644
25	1.316	1.708	2.252	2.485	2.787	85	1.294	1.668	2.000	2.378	2.645
26	1.315	1.706	2.251	2.479	2.779	86	1.293	1.668	2.000	2.377	2.643
27	1.314	1.703	2.250	2.473	2.771	87	1.293	1.668	2.000	2.377	2.642
28	1.313	1.701	2.248	2.467	2.765	88	1.293	1.668	2.000	2.376	2.641
29	1.311	1.699	2.246	2.462	2.758	89	1.293	1.668	2.000	2.376	2.641
30	1.310	1.697	2.245	2.457	2.750	90	1.293	1.668	2.000	2.375	2.640
31	1.309	1.696	2.244	2.453	2.744	91	1.293	1.665	2.000	2.374	2.639
32	1.309	1.694	2.243	2.449	2.738	92	1.293	1.665	2.000	2.374	2.639
33	1.308	1.692	2.242	2.445	2.733	93	1.293	1.665	2.000	2.373	2.638
34	1.307	1.691	2.241	2.441	2.728	94	1.293	1.665	2.000	2.373	2.637
35	1.306	1.690	2.240	2.438	2.724	95	1.293	1.665	2.000	2.372	2.637
36	1.306	1.688	2.238	2.434	2.719	96	1.292	1.664	2.000	2.372	2.636
37	1.305	1.687	2.238	2.431	2.715	97	1.292	1.664	2.000	2.371	2.635
38	1.304	1.686	2.234	2.428	2.712	98	1.292	1.664	2.000	2.371	2.635
39	1.304	1.685	2.233	2.426	2.708	99	1.292	1.664	2.000	2.370	2.634
40	1.303	1.684	2.231	2.423	2.704	100	1.292	1.664	2.000	2.370	2.633
41	1.303	1.683	2.230	2.421	2.701	101	1.292	1.663	2.000	2.369	2.633
42	1.302	1.682	2.218	2.418	2.698	102	1.292	1.663	2.000	2.369	2.632
43	1.302	1.681	2.217	2.416	2.695	103	1.292	1.663	2.000	2.368	2.631
44	1.301	1.680	2.215	2.414	2.692	104	1.292	1.663	2.000	2.368	2.631
45	1.301	1.679	2.214	2.412	2.690	105	1.292	1.663	2.000	2.367	2.630
46	1.300	1.679	2.213	2.410	2.687	106	1.291	1.663	2.000	2.367	2.629
47	1.300	1.678	2.212	2.408	2.685	107	1.291	1.662	2.000	2.366	2.629
48	1.299	1.677	2.211	2.407	2.682	108	1.291	1.662	2.000	2.366	2.628
49	1.299	1.677	2.210	2.405	2.680	109	1.291	1.662	2.000	2.365	2.627
50	1.299	1.676	2.209	2.403	2.678	110	1.291	1.662	2.000	2.365	2.627
51	1.298	1.675	2.208	2.402	2.676	111	1.291	1.662	2.000	2.364	2.626
52	1.298	1.675	2.207	2.400	2.674	112	1.291	1.661	2.000	2.364	2.625
53	1.298	1.674	2.206	2.399	2.672	113	1.291	1.661	2.000	2.363	2.625
54	1.297	1.674	2.205	2.397	2.670	114	1.291	1.661	2.000	2.363	2.624
55	1.297	1.673	2.204	2.395	2.668	115	1.291	1.661	2.000	2.362	2.623
56	1.297	1.673	2.203	2.395	2.667	116	1.290	1.661	2.000	2.362	2.623
57	1.297	1.672	2.202	2.394	2.665	117	1.290	1.661	2.000	2.361	2.622
58	1.296	1.672	2.202	2.392	2.663	118	1.290	1.660	2.000	2.361	2.621
59	1.296	1.671	2.201	2.391	2.662	119	1.290	1.660	2.000	2.360	2.621
60	1.296	1.671	2.200	2.390	2.660	120	1.290	1.660	2.000	2.360	2.620

Table of Percentage Points of the t -Distribution. Biometrika, Vol. 33 (1946), p. 300. Reproduced by permission of the Biometrika Trustees.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
JL. MAWAR NO. 8 TEL : (061) 7952370 FAX : (061) 7956076
LUBUK PAKAM - 20514

Nomor : 070/227
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian/Riset

Lubuk Pakam, 06 Juni 2018

Kepada Yth :
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Di-

Lubuk Pakam

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 070/748/BPDS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 perihal Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN dalam rangka penyelesaian program pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang selama **1 (satu) Bulan**.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan dapat menyetujui Permohonan Penelitian/Riset di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang An :

Nama : **Mayang Sari Nasution**
Alamat : Jl. Pertemuan, Petumbukan, Kecamatan Galang
NIM/NIP/KTP : 15143033
Pekerjaan : Mahasiswi
NIDN : 27133081
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

3. Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya.

**An. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG**
SEKRETARIS


RICKY SUPRIADY, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19691022 199803 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1. Nama : Mayang Sari Nasution
2. Nim : 51143033
3. Tempat/Tgl Lahir : Petumbukan, 13 Juli 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Pertemuan No. 145 Petumbukan, Galang

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 101967 Petumbukan Berijazah tahun 2008
2. Tamatan SMP YPAK PTPN III Sei Karang Berijazah tahun 2011
3. Tamatan SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Berijazah tahun 2014